

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hak Asasi Manusia, yang seharusnya bersifat universal, menetapkan bahwa pria dan wanita, anak perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama terhadap kehidupan, pendidikan, dan partisipasi politik. Namun, ironisnya, pelanggaran terhadap hak-hak ini terjadi setiap hari di berbagai negara. Khususnya, perempuan seringkali menjadi korban kekerasan, dan data yang semakin melimpah dalam beberapa dekade terakhir mengungkapkan tingkat prevalensi yang mengkhawatirkan. Fenomena ini juga terkait dengan perubahan iklim dan degradasi lingkungan pada awal tahun 1990-an, di mana kekerasan terhadap perempuan meningkat akibat pengungsi, kelangkaan sumber daya, dan gangguan pelayanan. Sebagai contoh, pasca-Badai Katrina pada tahun 2005, terjadi peningkatan drastis dalam tingkat pemerkosaan di kalangan perempuan yang mengungsi (UN,1948). Namun, dalam praktiknya, hak-hak ini dilanggar setiap hari dalam berbagai cara – di hampir setiap negara di dunia. Dalam beberapa dekade terakhir, ketersediaan data tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan telah meningkat secara signifikan.

Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap perempuan di kawasan ASEAN mencakup berbagai kasus yang menggambarkan tantangan serius dalam mencapai kesetaraan gender dan perlindungan hak-hak perempuan. Di Myanmar, krisis Rohingya menyaksikan pelanggaran HAM terhadap perempuan, termasuk kekerasan seksual dan pemaksaan perpindahan. Indonesia menghadapi tantangan diskriminasi gender di tempat kerja, seperti ketidaksetaraan dalam gaji dan promosi. Filipina melaporkan kasus kekerasan berbasis gender, termasuk kekerasan dalam rumah tangga dan pelecehan seksual. Vietnam memiliki masalah perdagangan manusia, dengan perempuan rentan dieksploitasi secara seksual dan sebagai pekerja paksa. Kamboja menghadapi masalah prostitusi dan perdagangan seks yang merugikan perempuan. Pekerja migran perempuan di Thailand dan Malaysia rentan terhadap eksploitasi dan pelecehan. Di Brunei Darussalam, ancaman hukuman mati untuk homoseksualitas memperburuk hak asasi perempuan LGBT. Laos menghadapi tantangan akses terbatas perempuan ke pendidikan. Pekerja rumah tangga perempuan di Malaysia sering menghadapi pelecehan dan kondisi kerja yang buruk. Di Singapura, perempuan migran dapat menghadapi risiko penghapusan status tanah air mereka. Kasus-kasus ini menyoroti perlunya upaya

bersama di tingkat regional untuk menanggapi dan mencegah pelanggaran HAM terhadap perempuan di ASEAN.

Pada tahun 2022, statistik menunjukkan bahwa sekitar 48.800 perempuan dan anak perempuan tewas oleh pasangannya sendiri atau anggota keluarga lainnya (UN Women, 2023). Meskipun prevalensi kekerasan terhadap perempuan mencapai tingkat yang mengkhawatirkan secara global, dampak pandemi COVID-19 juga memperparah situasi ini, dengan 45% perempuan melaporkan pengalaman kekerasan sejak dimulainya pandemi. Tantangan nyata yang dihadapi adalah perubahan dalam partisipasi perempuan di pasar tenaga kerja, peningkatan kemiskinan ekstrem, dan meningkatnya beban pekerjaan perawatan dan pekerjaan rumah tangga, semuanya memperburuk faktor risiko dan pendorong kekerasan terhadap perempuan (UN Women, 2023).

Namun, Kurang dari 40 persen perempuan yang mengalami kekerasan mencari bantuan dari segala jenis. Di sebagian besar negara yang memiliki data tentang masalah ini, di antara perempuan yang mencari bantuan, sebagian besar mencari dukungan dari keluarga dan teman-teman dan sangat sedikit mencari bantuan dari lembaga formal, seperti kepolisian dan layanan kesehatan. Kurang dari 10 persen dari mereka yang mencari bantuan melaporkan ke polisi. Setidaknya 162 negara telah mengeluarkan undang-undang tentang kekerasan dalam rumah tangga, dan 147 memiliki undang-undang tentang pelecehan seksual di tempat kerja. Namun, bahkan ketika undang-undang ada, ini tidak selalu berarti bahwa mereka selalu sesuai dengan standar dan rekomendasi internasional atau diterapkan dan dilaksanakan (UN Women, 2023)

Tabel 1. 1 Proporsi dan Jumlah Perempuan Asia Tenggara

Aspek	Tahun	Data	Sumber
Partisipasi dalam Angkatan Kerja	2004	Proporsi perempuan dalam angkatan kerja sekitar 50%	UN Women
	2014	Proporsi perempuan dalam angkatan kerja meningkat menjadi sekitar 51%	International Labour Organization
	2022	Proporsi perempuan dalam angkatan kerja mencapai 52%, dengan kesenjangan dengan laki-laki	World Bank

Pendidikan	2004	Rasio gross enrollment rate untuk pendidikan dasar hampir setara dengan laki-laki (97%)	UNESCO
	2014	Tingkat partisipasi perempuan dalam pendidikan menengah mencapai 98%	UNESCO
	2022	Partisipasi perempuan dalam pendidikan tinggi mencapai 52% di banyak negara	World Bank
Keterlibatan Politik	2004	Proporsi perempuan di kursi parlemen sekitar 10%	IPU
	2014	Proporsi perempuan di kursi parlemen meningkat menjadi sekitar 20%	IPU
	2022	Proporsi perempuan di kursi parlemen mencapai 23%	IPU
Kesehatan dan Kesejahteraan	2004	Akses perempuan ke layanan kesehatan dasar relatif baik, tetapi ada kesenjangan dalam akses ke layanan kesehatan lebih canggih	WHO
	2014	Penurunan angka kematian ibu dan peningkatan akses ke perawatan kesehatan	WHO
	2022	Akses perempuan ke layanan kesehatan meningkat dengan kebijakan kesehatan yang lebih inklusif	WHO

Sumber : Diolah Peneliti

Dalam dua puluh tahun terakhir, Asia Tenggara telah menjadi kekuatan yang signifikan dalam perekonomian dan politik dunia. Selain itu, pemerintah juga telah membuat kemajuan dalam mengurangi kesenjangan gender di bidang-bidang penting seperti layanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan keterlibatan politik. Namun demikian, jika diteliti lebih lanjut terhadap berbagai negara di kawasan ini, menjadi jelas bahwa kemajuan ini tidak konsisten, dan kesenjangan yang signifikan masih terjadi di beberapa bidang. Meskipun kesenjangan gender berdampak pada kedua gender, namun sebagian besar perempuanlah yang menanggung beban ketidakadilan gender. Berikut adalah rekapitulasi proporsi Perempuan di Asia Tenggara:

Tabel 1. 2 Proporsi Perempuan di Asia Tenggara

Negara	Persentase
Thailand	51.45
Vietnam	50.6
Kamboja	50.5
Myanmar	50.23
Indonesia	49.65
Laos	49.6
Filipina	49.22
Timor Leste	49
Malaysia	48.9
Brunei Darussalam	48.28
Singapura	47.7

Sumber : (Databoks Katadata, 2023).

Berdasarkan tabel diatas, menurut data dari Bank Dunia, Thailand menduduki peringkat tertinggi dalam persentase perempuan di Asia Tenggara pada tahun lalu, dengan proporsi mencapai 51,45% dari total populasi sekitar 71,69 juta jiwa. Vietnam menempati posisi kedua dengan persentase perempuan sekitar 50,6%, diikuti oleh Kamboja dan Myanmar yang memiliki proporsi perempuan masing-masing sebanyak 50,5% dan 50,23% dari total penduduk negara mereka. Sementara itu, Singapura mencatat persentase perempuan terendah di kawasan

ini, yaitu hanya 47,7% dari total populasi sekitar 5,63 juta jiwa. Meskipun Singapura memiliki proporsi perempuan terendah, angkanya masih di atas 30%, tetap masuk dalam kategori tinggi

Ada 3 hal yang terlihat jelas dalam kesenjangan yang terjadi. Pertama, Kesenjangan upah berdasarkan gender terlihat jelas dalam masalah remunerasi bagi perempuan di angkatan kerja. Menurut data dari Bank Pembangunan Asia, perempuan di Asia Tenggara biasanya berpenghasilan 30% hingga 40% lebih rendah dibandingkan rata-rata laki-laki (Sirivunnabood, 2021). Kesenjangan upah dapat disebabkan oleh berbagai variabel, seperti perempuan yang mengambil cuti kerja karena alasan kehamilan atau memilih pekerjaan paruh waktu. Kemudian, Gaji pokok laki-laki di negara-negara Asia Tenggara juga sekitar 15% lebih tinggi dibandingkan perempuan. Malaysia dan Singapura berada pada posisi yang berlawanan dalam hal ini, dimana laki-laki memperoleh penghasilan 30% lebih tinggi dibandingkan perempuan untuk pekerjaan yang setara. Kesenjangan antar gender semakin terlihat ketika mengkaji peran profesional dan manajerial, dimana laki-laki mempunyai penghasilan rata-rata 45% lebih tinggi dibandingkan perempuan. Namun, Singapura, dan Filipina menonjol sebagai anomali, karena manajer dan profesional perempuan memperoleh penghasilan sekitar 10% lebih rendah daripada rata-rata rekan kerja laki-laki mereka. Meskipun demikian, angka-angka ini menunjukkan pentingnya dan pentingnya melakukan kemajuan tambahan dalam mencapai kesetaraan gaji. Hal ini sangat penting mengingat pertumbuhan besar angkatan kerja perempuan secara global, yang telah meningkat dari 1,5 miliar menjadi 1,75 miliar selama dekade terakhir (Sirivunnabood, 2021).

Kedua, hak Properti dan Kepemilikan. Menjamin keamanan dan perlindungan hak milik perempuan sangat penting bagi pembangunan sosial dan ekonomi. Namun sayangnya, mencapai tujuan ini masih cukup sulit dan menantang. Perkiraan terbaru menunjukkan bahwa sekitar 400 juta perempuan di seluruh dunia bekerja di kegiatan pertanian, sehingga memberikan kontribusi signifikan terhadap produksi pangan global. Namun persentase perempuan yang memiliki kepemilikan sah atas tanah yang mereka garap kurang dari 20% (Deo, 2023). Hak milik perempuan dibatasi di berbagai masyarakat Asia Tenggara karena tradisi patriarki dan sikap sosial tertentu, meskipun terdapat kesetaraan formal. Dalam beberapa kasus, negara-negara tertentu telah menerapkan langkah-langkah yang secara efektif menghambat kemajuan umum menuju kesetaraan gender.

Ketiga, Partisipasi dalam kegiatan politik. Terdapat variasi yang signifikan dalam tingkat partisipasi perempuan dalam kehidupan politik di kawasan Asia Tenggara.

Tabel 1. 3 Presentasi Keterwakilan Parlemen Perempuan di Asia Tenggara

Negara	Perempuan	Laki Laki
Timor Leste	38.5	61.5
Filipina	28	72
Laos	27.5	72.5
Vietnam	26.7	73.3
Singapura	23	77
Kamboja	20	80
Indonesia	17.4	82.6
Thailand	16.2	83.8
Malaysia	14.4	85.6
Myanmar	11.3	88.7
Brunei Darussalam	9.1	90.9

Sumber : (Databoks Katadata, 2020)

Partisipasi perempuan dalam kehidupan politik Asia Tenggara menunjukkan variasi yang signifikan. Meskipun Timor Leste belum mencapai tingkat pembangunan seperti negara-negara tetangga, partisipasi perempuannya di parlemen mencapai puncak tertinggi, yaitu 38,5%. Hal ini mencerminkan komitmen yang kuat terhadap representasi gender di ranah politik. Sebaliknya, Brunei Darussalam dan Myanmar memiliki keterwakilan perempuan paling rendah di parlemen, masing-masing hanya 9,1% dan 11,3%, menunjukkan tantangan dalam mencapai kesetaraan gender dalam partisipasi politik. Meskipun Indonesia berada di peringkat ketujuh dengan 17,4%, kepemimpinan perempuan, seperti Puan Maharani yang memimpin DPR, memberikan dorongan positif. Perbandingan ini menyoroti kesenjangan partisipasi politik gender di Asia Tenggara

Tabel 1. 4 GII Asia Tenggara 2019

Negara	Indeka GII
Kamboja	0.473

Laos	0.461
Myanmar	0.456
Indonesia	0.453
Filipina	0.427
Thailand	0.393
Vietnam	0.304
Malaysia	0.287
Brunei Darussalam	0.236
Singapura	0.067

Sumber :(Databoks Katadata, 2019)

Berdasarkan Tabel 1.4 diatas dimana ada data lain mengenai Indeks ketimpangan gender (Gender Inequality Index/GII) di Asia Tenggara (Lihat Tabel 1.3) Singapura memiliki skor terendah di ASEAN, sementara Indonesia memiliki skor tertinggi, menurut data yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Singapura menerima skor GII 0,065 poin dari UNDP. Di antara negara-negara ASEAN lainnya, negara ini memiliki pencapaian GII terbaik (Databoks Katadata,2019).

GII Singapura mencapai prestasi luar biasa dalam kesehatan reproduksi, ditandai dengan tingkat kematian ibu (MMR) yang rendah dan tingkat kelahiran remaja (ABR). Kesetaraan dalam pendidikan, kesempatan kerja, dan partisipasi perempuan di parlemen juga terwujud. Sedangkan Malaysia dan Brunei Darussalam menempati posisi kedua dan ketiga dengan GII terendah di ASEAN, masing-masing dengan skor 0,253 poin dan 0,255 poin. Indikator kesehatan reproduksi yang cukup baik dan gap capaian pendidikan antara laki-laki dan perempuan mendukung GII yang rendah di kedua negara tersebut. Namun, Indonesia memiliki skor GII tertinggi di antara negara-negara ASEAN, yaitu 0,48 poin. Ini menunjukkan bahwa Indonesia bukan satu-satunya negara ASEAN yang memiliki pencapaian pembangunan gender yang buruk. Ini tidak hanya terjadi di wilayah ASEAN, tetapi juga di seluruh dunia dan di Asia Timur dan Pasifik. Pada 2019, ketimpangan gender Indonesia berada di peringkat 121 dari 162 negara, dengan skor GII bahkan di atas rata-rata global sebesar 0,436 poin. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia harus melakukan lebih banyak untuk mengejar ketertinggalan

tersebut melalui kebijakan kesehatan, pemberdayaan, dan akses pasar tenaga kerja (Databoks Katadata, 2019).

Dalam hal ini, hambatan utama terhadap kemajuan kesetaraan gender di Asia Tenggara adalah perasaan budaya yang masih melekat kuat pada peran gender tradisional, sebuah sentimen yang masih tersebar luas di Filipina dan Singapura. Sentimen budaya yang berlaku di Asia Tenggara mengenai peran gender menjadi hambatan besar dalam mencapai kesetaraan gender, karena sering kali mendukung norma-norma patriarki, sehingga melanggengkan masyarakat yang didominasi oleh laki-laki. Ideologi patriarki ini menegakkan norma-norma gender, yang mana perempuan diharapkan patuh dan, akibatnya, dianggap lebih rendah dibandingkan laki-laki. Laporan tahun 2014 yang diterbitkan oleh Kemitraan, sebuah organisasi pemerintah Indonesia, mengungkapkan bahwa nilai-nilai patriarki di negara-negara Asia Tenggara telah meresap ke dalam ranah negara dan sosial, sehingga menimbulkan bias yang berkontribusi terhadap ketidaksetaraan gender. Bias ini mencakup marginalisasi perwakilan perempuan dan persepsi gender terhadap pengetahuan dan kemampuan analitis (Databoks Katadata, 2019).

Perempuan di Kawasan Asia Tenggara terus menghadapi tantangan seperti berbagai jenis kekerasan dan diskriminasi termasuk pernikahan anak, dini dan paksa, terbatasnya akses terhadap dukungan seperti pendidikan dan layanan kesehatan reproduksi, dan akses terhadap peluang (ASEAN, 2018). Ketika perempuan memasuki dunia kerja, sebagian besar dari mereka berada di sektor informal dengan akses terbatas terhadap perlindungan sosial. Meningkatnya jumlah perempuan yang bekerja di industri garmen dan tekstil, serta pariwisata dan industri kreatif cenderung memperkuat stereotip gender. Baik di sektor formal maupun informal, perempuan mempunyai penghasilan yang lebih rendah dibandingkan laki-laki, dan mereka yang bekerja di sektor korporasi memiliki peluang yang terbatas untuk memecahkan batasan tersebut dan menduduki posisi manajemen senior. Di seluruh sektor formal dan informal, serta kontinum perkotaan dan pedesaan, perempuan di wilayah ini terus memerangi kekerasan dan diskriminasi, melakukan advokasi untuk pengakuan, redistribusi dan remunerasi atas perawatan tidak berbayar dan pekerjaan rumah tangga, serta mewujudkan hak-hak mereka terhadap kesetaraan gender.

Populasi muda di kawasan ini yang berusia 18 tahun ke bawah semakin terlibat dalam realisasi hak asasi manusia mereka di tengah sejumlah ancaman yang ada dan yang akan muncul. Di seluruh kawasan, akses anak-anak terhadap internet menciptakan peluang namun

juga menimbulkan kekhawatiran mengenai keamanan online, termasuk eksploitasi dan pelecehan serta pelanggaran privasi pribadi. Anak-anak semakin terkena dampak krisis iklim, yang memperburuk kerentanan dan kesenjangan yang ada. Migrasi sukarela dan paksa juga berdampak signifikan terhadap anak-anak dan keluarga mereka. Dan kejadian berbagai bentuk kekerasan terus memberikan dampak negatif terhadap anak-anak di kawasan ini sehingga merugikan potensi kontribusi mereka terhadap Pembangunan Komunitas ASEAN (ASEAN, 2023).

Penting untuk diingat bahwa situasi sosial perempuan di Asia Tenggara sangat kompleks dan bervariasi di antara negara-negara dalam kawasan tersebut. Sementara banyak perempuan di Asia Tenggara telah mencapai prestasi luar biasa dalam berbagai bidang, ada beberapa isu dan faktor yang dapat menyebabkan perempuan mengalami marginalisasi dalam beberapa konteks. Berikut adalah beberapa faktor umum yang mungkin berkontribusi pada marginalisasi perempuan di Asia Tenggara, Pertama Budaya dan Tradisi. Beberapa masyarakat di Asia Tenggara masih memegang teguh norma budaya yang mengutamakan peran tradisional perempuan sebagai ibu dan pengurus rumah tangga. Ini dapat membatasi akses perempuan ke pendidikan dan peluang pekerjaan (Sakina & Siti, 2017). Kedua, Diskriminasi gender masih menjadi masalah serius di beberapa negara, dengan ketidaksetaraan dalam hak dan peluang antara laki-laki dan perempuan. Ini bisa tercermin dalam ketidaksetaraan upah, akses terbatas ke pendidikan, serta kurangnya partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan (Arbiyanti, 2020). Ketiga, Kekerasan terhadap perempuan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga dan pelecehan seksual, masih menjadi isu serius di beberapa negara Asia Tenggara. Hal ini dapat menciptakan lingkungan yang tidak aman dan merugikan bagi perempuan (WHO, 2021). Selain itu, Meskipun ada kemajuan dalam bidang pendidikan, beberapa perempuan di Asia Tenggara masih menghadapi hambatan dalam mengakses pendidikan tinggi atau pelatihan keterampilan yang dapat meningkatkan mobilitas sosial mereka. Terakhir, Partisipasi perempuan dalam kehidupan politik dan pengambilan keputusan politik masih belum optimal di beberapa negara. Faktor seperti ketidaksetaraan dalam perwakilan politik dan hambatan budaya dapat membatasi peran politik perempuan.

ASEAN merupakan tempat tinggal bagi lebih dari 600 juta penduduk, setengah di antaranya adalah perempuan. Saat ini, wilayah ini menjadi salah satu yang paling berkembang di dunia, dengan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 5,7 persen. Sejak didirikan pada tahun 1967, ASEAN bertujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi,

pembangunan sosial, dan perdamaian serta stabilitas di wilayah tersebut. Sejak awal berdirinya, telah ada upaya untuk mendukung hak-hak perempuan di antara negara-negara anggotanya (ASEAN, 2016).

Pada KTT ASEAN ke-10 pada November 2004, para Pemimpin ASEAN mengadopsi Program Aksi Vientiane 2004-2010 (VAP) yang, antara lain, mendesak pendirian Komisi ASEAN untuk Promosi dan Perlindungan Hak-hak Perempuan dan Anak (ACWC) (Langkah 1.1.4.7 dari VAP). Ini terwujud ketika ACWC secara resmi diluncurkan pada tahun 2010 sebagai mekanisme untuk meningkatkan perlindungan hak-hak perempuan dan anak-anak. Banyak yang menganggap badan antarpemerintah ini penting dan signifikan sebagai struktur pelengkap dari Komite ASEAN untuk Perempuan (ACW), yang terdiri dari mesin-mesin nasional tentang perempuan di wilayah tersebut (ASEAN, 2016).

Tabel 1.5 ACWC Workplan 2016-2020

Aspek	Keterangan
Tujuan Umum	Mempromosikan dan melindungi hak perempuan dan anak di ASEAN.
Prioritas Strategis	- Pengarusutamaan gender dalam kebijakan.
	- Pencegahan kekerasan berbasis gender.
	- Perlindungan hak anak.
	- Pemberdayaan perempuan.
Kegiatan Kunci	- Pelatihan dan workshop.
	- Kampanye kesadaran.
	- Kolaborasi dengan organisasi internasional.
	- Pengembangan kebijakan berbasis bukti.
Monitoring dan Evaluasi	- Pengumpulan data dampak program.
	- Laporan berkala tentang kemajuan implementasi.
Pencapaian Diharapkan	- Meningkatnya kesadaran publik.
	- Penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
	- Keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan lebih kuat.

Sumber : ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children (ACWC), 2016-2020 Work Plan

Dalam upaya memajukan hak-hak perempuan dan anak di Asia Tenggara, ASEAN *Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children* (ACWC) melalui *Workplan 2016-2020* memfokuskan kegiatannya pada pengarusutamaan gender, pencegahan kekerasan berbasis gender, perlindungan hak-hak anak, dan pemberdayaan perempuan. Prioritas ini diambil melihat tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak serta ketidaksetaraan gender yang masih signifikan di kawasan ini. *Workplan* ini juga mencakup pelatihan, kampanye kesadaran, serta kolaborasi dengan organisasi internasional untuk memperkuat perlindungan hukum dan pemberdayaan di tingkat nasional. Dengan pemantauan dan evaluasi yang ketat, ACWC berupaya memastikan bahwa negara-negara anggota ASEAN dapat merumuskan kebijakan berbasis bukti untuk mengurangi kekerasan dan meningkatkan kesetaraan gender serta hak-hak anak.

Sebelum adanya ACWC, berbagai pernyataan bersama, seperti Deklarasi Peningkatan Perempuan tahun 1988, Deklarasi Melawan Perdagangan Manusia, Khususnya Perempuan dan Anak-anak tahun 2004, dan Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan tahun 2004, membuka jalan bagi upaya regional dalam menangani isu-isu penting dan mendesak yang dihadapi oleh perempuan. Selain itu, Pernyataan Bersama dan Komitmen untuk Melaksanakan Pemajeman Gender pada tahun 2008 dianggap sebagai terobosan karena untuk pertama kalinya, ASEAN mengakui pentingnya Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) sebagai kerangka internasional panduan. Terakhir, CEDAW telah diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan di antara negara-negara anggota, dibantu sebagian besar oleh lembaga donor internasional, organisasi non-pemerintah, khususnya kelompok-kelompok perempuan (ASEAN, 2016).

Dalam konteks ASEAN, peran ACWC sangat penting untuk mendorong agenda perlindungan hak perempuan dan anak, serta pemberantasan kasus GBV di kawasan. Namun ada beberapa hal yang menghalangi ACWC untuk memaksimalkan upayanya dalam melaksanakan mandat tersebut (Mandala, 2021). Kurangnya peraturan perundang-undangan yang sensitif gender di negara-negara anggota ASEAN merupakan salah satu hambatan dalam mengakhiri kekerasan berbasis gender. Namun, di beberapa negara ASEAN yang memiliki undang-undang kesetaraan gender, seperti Laos, penerapannya masih menghadapi tantangan karena masih ada orang yang menentang undang-undang tersebut karena nilai-nilai tradisional dan budaya mereka. Kekhawatiran lainnya adalah rendahnya visibilitas ACWC di wilayah tersebut karena kurangnya informasi terkini dan online mengenai Komisi yang dapat diakses.

Beberapa perwakilan negara hanya memiliki halaman media sosial untuk menyebarkan informasi terkait pekerjaan ACWC. Oleh karena itu, tidak mengherankan bila peran progresif ACWC hanya terlihat di beberapa negara, seperti Indonesia, Thailand, dan Filipina. Hal ini kemungkinan besar disebabkan oleh terbatasnya dana; alokasi anggaran ACWC tidak bertambah dalam sepuluh tahun sejak berdirinya. Keterbatasan dukungan finansial tersebut menyebabkan hanya 25% dari total 48 kegiatan pada rencana kerja kedua (2016-2020) yang dapat diselesaikan (Mandala, 2021).

Hambatan-hambatan yang saling berkaitan ini pada akhirnya berdampak pada rendahnya keterlibatan ACWC dengan organisasi-organisasi akar rumput/CSO. Hal ini harus ditanggapi dengan serius karena pencegahan kekerasan paling baik dimulai melalui tingkat akar rumput. Kita dapat dengan mudah mendekati korban dan pelaku untuk mengidentifikasi kebutuhan mereka melalui komunitas akar rumput karena mereka juga merupakan bagian dari masyarakat. Pelibatan organisasi masyarakat sipil juga dapat menjembatani upaya advokasi, pendidikan, dan penyaluran bantuan langsung ke masyarakat.

Pada penelitian ini, peneliti membatasi analisis pada lima negara di Asia Tenggara, yaitu Timor Leste, Filipina, Laos, Indonesia, dan Vietnam. Pemilihan negara-negara ini didasarkan pada pertimbangan keragaman budaya, ekonomi, dan kebijakan sosial yang dapat memberikan perspektif yang lebih luas mengenai isu yang diteliti. Setiap negara memiliki tantangan dan peluang yang unik dalam konteks yang relevan, sehingga analisis komparatif antara negara-negara ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam. Penelitian ini juga bertujuan untuk memahami bagaimana faktor-faktor spesifik di masing-masing negara dapat mempengaruhi hasil yang diamati, serta memberikan rekomendasi yang tepat untuk pengembangan kebijakan yang lebih efektif di kawasan tersebut.

Pada akhirnya, memberantas kekerasan berbasis gender merupakan tugas sulit yang memerlukan intervensi masyarakat luas dalam mengatasi berbagai faktor sosial dan budaya. Namun, tampaknya hal yang paling penting—dan mungkin yang paling sulit—adalah meningkatkan kesadaran mengenai kesetaraan gender. Kita perlu mendekonstruksi budaya patriarki yang sudah tertanam di masyarakat. Jika tidak, kemungkinan besar pemerintah dan seluruh pihak terkait yang memperjuangkan kesetaraan gender akan terhambat. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membahas mengenai **“Upaya the Asean Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children (ACWC) Dalam Memajukan Hak Perempuan dan Anak di Kawasan Asia Tenggara Tahun 2016-2020”**

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana upaya ACWC sebagai bagian dari organisasi regional ASEAN dalam memajukan hak perempuan di kawasan Asia Tenggara?

1.3 Pembatasan Masalah

Penelitian ini akan berfokus pada peran ASEAN *Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children* (ACWC) dalam memajukan hak-hak perempuan di kawasan Asia Tenggara, dengan mengecualikan hak anak. Fokus geografis penelitian ini terbatas pada lima negara anggota ASEAN, yaitu Timor Leste, Filipina, Laos, Indonesia, dan Vietnam. Periode penelitian dibatasi pada *Workplan* ACWC tahun 2016-2020, yang menjadi dasar analisis terhadap berbagai program, kebijakan, dan inisiatif yang dikelola atau didukung oleh ACWC. Melalui perspektif feminisme dan hak asasi manusia, penelitian ini akan menganalisis upaya ACWC dalam mendekonstruksi struktur patriarki dan norma gender yang menghambat kesetaraan gender di kawasan tersebut.

1.4 Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1.4.1 Tujuan penelitian

1. Mengetahui urgensi kesenjangan hak perempuan di kawasan Asia Tenggara.
2. Menganalisis peran ACWC sebagai badan regional dalam isu hak perempuan.
3. Menganalisis upaya-upaya yang telah dilakukan ACWC untuk mengatasi kendala tersebut guna meningkatkan kesetaraan hak perempuan di Asia Tenggara.
4. Mengetahui capaian dan hambatan ACWC dalam memajukan hak perempuan di kawasan Asia Tenggara.

1.4.2 Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini memberikan sumbangsih teoritis dalam kajian Hubungan Internasional, khususnya di bidang organisasi internasional dan keamanan manusia. Dengan menggunakan perspektif feminisme dan hak asasi manusia, penelitian ini memperluas pemahaman tentang bagaimana organisasi internasional seperti ACWC memainkan peran dalam memajukan hak-hak perempuan. Analisis ini akan membantu mengembangkan teori yang lebih komprehensif mengenai interaksi antara organisasi internasional, keamanan manusia, dan dekonstruksi struktur patriarki di kawasan Asia Tenggara.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini memberikan kontribusi nyata bagi pengayaan referensi dalam bidang keamanan manusia, khususnya yang berkaitan dengan hak-hak perempuan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan oleh pembuat kebijakan, organisasi non-pemerintah, serta akademisi yang bekerja dalam isu-isu terkait keamanan perempuan dan gender di kawasan Asia Tenggara. Ini juga dapat memberikan wawasan bagi upaya peningkatan kebijakan dan program yang efektif untuk mendukung hak-hak perempuan di tingkat nasional dan regional.